

TESIS

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN
PEMERINTAH DAERAH TENTANG HAK DAN
KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA (BPD) DALAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DESA**



Diajukan Oleh :

**Muhammad Fahruni Anshari
NIM. 2320215310153**

**PROGAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

**KAJIAN YURIDIS KEWENANGAN PEMERINTAH
DAERAH TENTANG HAK DAN KEWAJIBAN BADAN
PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA**

TESIS

**Untuk Memperoleh Gelar Magister
Dalam Program Magister Hukum Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat**

**Diajukan Oleh :
Muhammad Fahruni Anshari
NIM. 2320215310153**

**PROGAM MAGISTER HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
BANJARMASIN
2025**

Judul Tesis : Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang
Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Nama : Muhammad Fahrani Anshari
NIM : 2320215310153

Disetujui,
Komisi Pembimbing

Pembimbing



Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

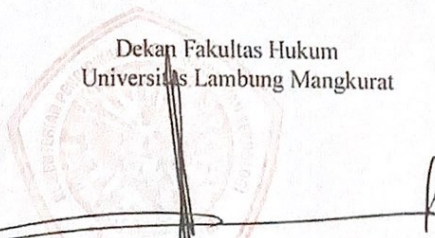
Diketahui,

Koordinator Program Magister Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tanggal Lulus :

Tanggal Wisuda :

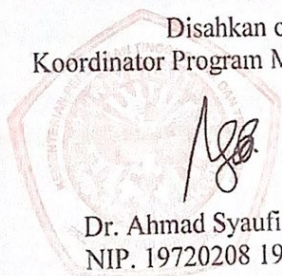
Tesis ini
Telah Diperiksa dan Disetujui
Pada Tanggal 14 Juli 2025

Pembimbing



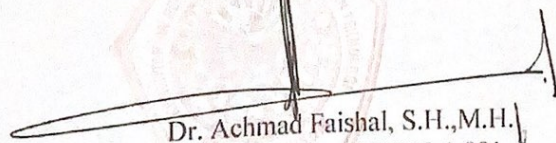
Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H.
NIP. 197805022001122002

Disahkan oleh
Koordinator Program Magister Hukum



Dr. Ahmad Syaafi, S.H., M.H.
NIP. 19720208 199903 1 004

Diketahui oleh
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Lambung Mangkurat



Dr. Achmad Faishal, S.H., M.H.
NIP. 19750615 200312 1 001

Tesis Ini Telah Dipertahankan
Di Depan
Sidang Panitia Penguji Tesis
Pada Tanggal 15 Juli 2025

Susunan Panitia Penguji Tesis

Ketua : Prof. Dr. H. M. Hadin Muhjad, S.H., M.Hum.
Sekretaris : Prof. Mirza Satria Buana, S.H., M.H., Ph.D.
Anggota : Dr. Hj. Erlina S.H.,M.H. (Pembimbing)

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidup dan matiku hanya karena Allah SWT”

Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya.

(HR.Thabrani & Daruquthni)

PERSEMBAHAN

Tesis ini penulis persembahkan untuk :

- Ayahanda Fakhruddin Razy dan Ibunda Rohana yang telah memberikan kasih sayang serta doa dan mengajarkan arti kehidupan yang sebenarnya.
- Adikku Muhammad Fairuzzabi Rahmani yang salalu memberikan support.
- Teman-teman Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat.

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Fahruni Anshari

NIM : 2320215310153

Program Studi : Magister Hukum

Konsentrasi Hukum : Hukum Tata Negara

menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilalihan tulisan atau pikiran orang lain yang saya akui sebagai hasil tulisan atau pikiran saya sendiri;
2. Dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka dan bebas dari plagiatisme.

Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan tesis ini hasil jiplakan sebagaimana dimaksud di atas, maka bersedia menerima sanksi atas perbuatantersebut.

Banjarmasin, 14 Juli 2025

Yang membuat pernyataan,



Muhammad Fahruni Anshari
NIM. 2320215310153

ANSHARI, FAHRUNI, MUHAMMAD. 2025. Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H.** 122 halaman.

RINGKASAN

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Indonesia. Merujuk kepada Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 desa memiliki landasan konstitusional yang mapan karena pemerintahan di tingkat desa disusun lewat undang-undang yang secara eksplisit bunyi pasal tersebut : "Pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara dan hak-hak asal usul dalam daerah yang bersifat Istimewa". Jika merujuk kepada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa kini desa berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan di dalamnya termuat banyak hal terkait tentang pengakomodiran hak-hak masyarakat mulai dari hak-hak tradisional yang diakui oleh negara dan hal lain yang diprakarsa oleh masyarakat itu sendiri. Undang-undang ini bertujuan untuk memperkuat tata kelola pemerintahan desa meningkatkan kualitas pelayanan publik di tingkat desa serta mendorong pembangunan desa yang berkelanjutan dan inklusif. Badan Permusyawaratan Desa merupakan salah satu pilar utama dalam sistem pemerintahan desa yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan dan efektivitas pelaksanaan pemerintahan di tingkat desa. Salah satu hak anggota BPD adalah mendapatkan tunjangan dari anggaran pendapatan dan belanja desa yang bersumber dari alokasi dana desa mendapatkan jaminan sosial di bidang kesehatan dan ketenagakerjaan dan mendapatkan tunjangan purnatugas berdasarkan kemampuan keuangan desa. Dalam hal ketidaksesuaian dalam alokasi anggaran tunjangan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa dengan peraturan daerah yang berlaku dapat menimbulkan berbagai potensi pelanggaran hukum yang signifikan. Ketidakpastian hukum dalam penetapan besar tunjangan BPD bisa juga berdampak pada pemborosan anggaran desa di mana alokasi tunjangan yang terlalu besar dapat mengganggu keseimbangan keuangan desa dan mengurangi porsi anggaran untuk program-program pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat.

Pengaturan Hak dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa atas Tunjangan Anggota Badan Permusyawaratan Desa adalah bentuk penghargaan yang diberikan kepada anggota BPD sebagai pengakuan atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menjalankan fungsi BPD, tunjangan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Dana untuk tunjangan BPD berasal dari APBDes

yang menunjukkan bahwa kemampuan keuangan desa sangat mempengaruhi besaran tunjangan yang diberikan. Kemampuan keuangan desa memainkan peran yang sangat penting dalam menentukan seberapa besar tunjangan yang dapat diberikan kepada anggota BPD. Pemerintah desa diberikan kebebasan untuk menyesuaikan besaran tunjangan dengan kondisi keuangan yang ada namun untuk menjaga standar yang adil dan transparan Peraturan Bupati tentang standar tunjangan BPD menjadi acuan penting dalam menentukan besaran tunjangan yang dapat diberikan. Besarnya tunjangan yang diberikan kepada anggota BPD sangat bergantung pada kemampuan keuangan desa. Dalam praktiknya desa dengan anggaran yang besar dapat memberikan tunjangan yang lebih layak kepada anggota BPD sebagai bentuk apresiasi atas tugas dan tanggung jawab mereka dalam menyerap aspirasi masyarakat serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Melalui regulasi yang ditetapkan pemerintah daerah dapat memberikan pedoman bagi desa dalam mengalokasikan tunjangan anggota BPD agar tetap sesuai dengan prinsip efisiensi dan keadilan. Pemerintah daerah memiliki kewenangan dalam menetapkan besaran tunjangan serta mekanisme pembayaran yang berlaku bagi anggota BPD di setiap desa dalam wilayahnya. Dengan demikian setiap desa memiliki pedoman yang jelas dalam menyusun anggaran untuk tunjangan anggota BPD.

Pemerintahan desa menjadi sebuah lembaga yang diharap dapat menyentuh langsung kebutuhan masyarakat karena desa merupakan unit pemerintahan terendah yang secara langsung berinteraksi dengan warga sehingga pemerintah desa memiliki pemahaman paling mendalam terhadap kebutuhan, potensi, dan permasalahan yang ada di wilayahnya. Oleh karena itu keterbukaan, akuntabilitas, dan partisipasi warga dalam proses keuangan desa sangat penting untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dikelola oleh desa benar-benar digunakan untuk kepentingan bersama dan mendukung pembangunan yang berkeadilan. Tujuan utama dari Dana Desa adalah untuk mempercepat pembangunan desa, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa secara merata. Dengan adanya Dana Desa pemerintah memberikan kesempatan kepada desa untuk merencanakan dan mengelola pembangunan sesuai dengan kebutuhan lokalnya dan memenuhi kebutuhan dasar. Berbeda dengan Dana Desa yang fokus pada pembangunan fisik dan pemberdayaan ekonomi, ADD lebih banyak digunakan untuk membiayai kegiatan rutin pemerintahan desa seperti honorarium perangkat desa, operasional kantor, dan tunjangan lainnya. Selain Dana Desa, Alokasi Dana Desa, dan Pendapatan Asli Desa, pemerintah desa juga dapat memperoleh sumber keuangan dari pihak ketiga dalam bentuk bantuan atau hibah. Setiap transaksi baik itu berupa pemasukan seperti Dana Desa atau Alokasi Dana Desa, maupun pengeluaran untuk program pembangunan dan operasional desa, harus dicatat dalam buku kas desa atau aplikasi keuangan desa yang telah disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Selain itu sistem keuangan yang kuat juga memperkuat hubungan antara pemerintah desa dan masyarakat. Transparansi dalam pengelolaan anggaran desa memungkinkan masyarakat untuk ikut serta dalam proses perencanaan dan pengawasan keuangan desa.

ANSHARI, FAHRUNI, MUHAMMAD. 2025. Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H.** 122 halaman.

ABSTRAK

Kata Kunci : Pemerintahan Desa, Badan Permusyawaratan Desa, Tunjangan Anggota BPD.

Penelitian ini untuk mengetahui dan menganalisis hak dan kewajiban yang relevan bagi anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan mengetahui instrumen yang tepat dalam menetapkan tunjangan bagi anggota BPD. Dengan tujuan tersebut maka masalah yang dibahas adalah bagaimana Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Apakah kebijakan hukum yang tepat untuk melakukan pengaturan tunjangan untuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD)? Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual. (Permendagri) Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa belum secara jelas dan rinci menentukan nilai tunjangan bagi anggota BPD. Dalam aturan tersebut hanya berbunyi nilai tunjangan BPD ditetapkan oleh bupati/wali kota. Sehingga saat ini terjadi kurang ketegasan norma, akibatnya terjadi perbedaan jumlah tunjangan anggota BPD di setiap wilayah karena daerah-daerah mengambil kebijakan secara sepihak mengingat tidak adanya acuan yang jelas. Hal ini berdampak kepada rasa ketidakadilan dan akan berpengaruh terhadap kinerja BPD dalam menjalannya sistem pemerintahan desa. Sebaiknya saat ini ada acuan aturan yang jelas terhadap hak keuangan anggota BPD yang berlaku secara nasional. Yang paling efektif jika acuan hak keuangan atau tunjangan bagi anggota BPD adalah berbasis kinerja atau pay for performance, contoh anggota BPD mendapatkan tunjangan jika mereka membuat sebuah peraturan desa atau membuat laporan berkala atas jalannya program pemerintah desa. Tunjangan berbasis kinerja ini diharapkan mampu menciptakan rasa adil terhadap semua anggota BPD di semua wilayah, kemudian dapat meningkatkan produktivitas anggota BPD karena mereka dituntut untuk profesional dalam kerja. Hal ini akan menciptakan keseimbangan sistem pemerintahan antara pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa, dampaknya adalah realisasi program pemerintah desa di lingkungan masyarakat akan lebih efektif atas pengawasan yang tersistematis oleh BPD.

ANSHARI, FAHRUNI, MUHAMMAD. 2025. Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Program Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Program Pascasarjana, Universitas Lambung Mangkurat, Pembimbing: **Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H.** 122 halaman.

ABSTRACT

This study is to determine and analyze the rights and obligations that are relevant for members of the village consultative body (BPD) and know the right instruments in determining benefits for BPD members. With this purpose, the problem discussed is how the juridical study of Local Government Authority on the rights and obligations of the village consultative body (BPD) in the administration of village government. Is it the right legal policy to arrange allowances for Village consultative bodies (BPD)? The research method used is normative juridical method with legislation approach, conceptual approach. (Permendagri) number 110 of 2016 concerning the village consultative body has not clearly and in detail determined the value of benefits for BPD members. In the rules only reads the value of bpd allowance set by the Regent/mayor. So that there is currently a lack of firmness of norms, as a result there are differences in the amount of bpd member benefits in each region because the regions take policies unilaterally considering that there is no clear reference. This has an impact on the sense of injustice and will affect the performance of BPD in running the village government system. We recommend that there is currently a clear reference to the financial rights of BPD members that apply nationally. It is most effective if the reference to financial rights or benefits for BPD members is performance-based or pay for performance, for example BPD members get benefits if they make a village regulation or make periodic reports on the course of village government programs. This performance-based allowance is expected to create a sense of fairness to all BPD members in all regions, then it can increase the productivity of BPD members because they are required to be professionals at work. This will create a balance of governance systems between village governments and Village consultative bodies, the impact is the realization of village government programs in the community will be more effective over the systematic supervision by BPD.

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah, Puji syukur penulis kepada Allah Yang Maha Esa, Tuhan semesta alam, yang telah melimpahkan berkat, kasih dan rahmat-Nya, hamba yang lemah dan fakir ini hanya milik Allah SWT, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul *Kajian Yuridis Kewenangan Pemerintah Daerah Tentang Hak Dan Kewajiban Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* ini sebagai tugas akhir dalam mengikuti Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pasca Sarjana Universitas Lambung Mangkurat dapat di selesaikan.

Penghargaan dan terima kasih yang setinggi-tingginya penulis ucapan kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan dukungan yang baik dan tanpa mengurangi rasa simpati dan hormat kepada mereka yang tidak dapat disebutkan satu-persatu dalam kesempatan ini, dan perkenankan penulis menghaturkan penghargaan dan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
2. Bapak Direktur Program Pasacasarjana Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
3. Bapak Dekan Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin
4. Bapak Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin

5. Ibu Dr. HJ. Erlina, S.H., M.H. (Pembimbing) yang senantiasa memberikan penghargaan, bimbingan penulisan tesis dan memberikan motivasi sehingga memperlancar penulisan dan penyelesaian tesis ini.
6. Staf administrasi dan rekan mahasiswa Program Pascasarjana Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat Konsentrasi Tata Negara angkatan 2023 yang telah memberikan motivasi, kritik dan saran sehingga memperlancar penelitian.
7. Teman-teman di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Lambung Mangkurat angkatan 2023.
8. Semua pihak yang membantu penulis dalam penulisan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu
Terlalu banyak yang telah penulis terima dari mereka, dan penulis tidak mampu untuk membalasnya. Semoga Allah Subbhanahu Wata'ala memberikan imbalan yang lebih baik dari yang telah mereka berikan.

Akhirnya harapan penulis tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua

Banjarmasin 24 Juli 2025

Penulis,

Muhammad Fahrani Anshari

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL DEPAN	
HALAMAN JUDUL DALAM	
HALAMAN PENGESAHAN	
HALAMAN PANITIA PENGUJI TESIS	
HALAMAN MOTTO/PERSEMBAHAN	
HALAMAN PERNYATAAN	
RINGKASAN	
ABSTRAK	
UCAPAN TERIMA KASIH	
DAFTAR ISI	
BAB I	PENDAHULUAN 1
A.	Latar Belakang Masalah 1
B.	Rumusan Masalah 16
C.	Keaslian Penelitian 16
D.	Tujuan Dan Kegunaan Penelitian 18
E.	Tinjauan Pustaka 19
F.	Metode Penelitian 39
G.	Pertanggungjawaban Sistematika Penulisan 43
BAB II	PENGATURAN HAK DAN KEWAJIBAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DAN ANALISIS TERHADAP TUNJANGAN KINERJA ANGGOTA BPD 45
A.	Pengaturan Hak dan Kewajiban BPD 45
B.	Dampak Kurang Ketegasan Norma Terkait Hak BPD 63
BAB III	HAK DAN KEWAJIBAN BPD DALAM SISTEM PEMERINTAHAN DESA 77
A.	Sistem Keuangan dalam Pemerintahan Desa 77
B.	Analisis Hak dan Kewajiban Anggota BPD 89
BAB IV	PENUTUP 100
A.	Kesimpulan 100
B.	Saran 100
DAFTAR PUSTAKA	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	